

ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM PROVINSI, NILAI TUKAR PETANI, DAYA BELI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN ANTAR PROVINSI DI SULAWESI

La Ode Samsul Barani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Email: samsulkaledupa@gmail.com

¹Ahmad ²Syamsir Nur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Email: ahamddduho230120@gmail.com

Email : syamsirnur81@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Objek penelitian pada 6 Provinsi di Sulawesi, periode pengamatan tahun 2010-2018. Analisis data menggunakan Regresi Data Panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews10,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Secara simultan, variabel Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Secara Parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah; Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia. Variabel yang berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi adalah; Nilai Tukar Petani.

Kata Kunci: Pengangguran Terbuka; Upah Minimum Provinsi; Nilai Tukar Petani; Daya Beli; indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

ABSTRACT

This Study aims to determine and analyze the influence of Open Unemployment, Provincial Minimum Wages, Farmer Exchange Rates, Purchasing Power and Human Development Index significantly influence Provincial Poverty in Sulawesi. The study uses secondary data consisting of Open Unemployment, Provincial Minimum Wages, Farmer Exchange Rates, Purchasing Power, Human Development Index and Poverty. The research objects consisted of 6 Provinces in Sulawesi with the observation period of 2010-2018. Data analysis using panel data regression with the help of Eviews 10,0 software. The results showed the simultaneously, Open Unemployment, Provincial Minimum Wages, Farmer Exchange Rates, Purchasing Power and Human Development Index significantly influence Provincial Poverty in Sulawesi are: Open Unemployment, Provincial Minimum Wages, and the Human Development index, variables that have in-significant effect on Provincial Poverty in Sulawesi are: Exchange Rates.

Keywords: Open Unemployment, Minimum Provincial Wages, Farmer Exchange Rate, Purchasing Power, Human Development Index and Poverty.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan Provinsi di Sulawesi, masih merupakan pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah provinsi untuk ditangani dan dicarikan solusinya. Banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menjadi momok tersendiri bagi pembangunan provinsi di Sulawesi, karena akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Beberapa yang dirumuskan dari hasil kajian empiris yang diduga menjadi penyebab kemiskinan adalah Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengangguran dinyatakan dalam Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan faktor yang diduga menyebabkan kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Di samping itu besaran tingkat Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi dan Daya Beli

penduduk diduga juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kemiskinan Di Sulawesi. Selain keempat faktor tersebut, tingkat kesejahteraan petani yang diproksi oleh Nilai Tukar Petani (NTP) juga diduga menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Fenomena hubungan antara kelima variabel tersebut dengan kemiskinan secara empiris Provinsi di Sulawesi yang disebabkan oleh faktor pengangguran, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Indeks Pembangunan Manusia,

dalam periode 2015-2018, perkembangan Pengangguran Terbuka, cenderung menurun dan nilai IPM dan NTP memperlihatkan kecenderungan yang fluktuasi. Meningkatnya nilai IPM dan NTP tersebut berbanding terbalik dengan kemiskinan provinsi di Sulawesi. Artinya bahwa keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kesejahteraan petani, dengan menggunakan indikator (NTP) telah mampu menurunkan kemiskinan. Kontradiktif dengan IPM dan NTP, perkembangan Pengangguran Terbuka yang menunjukkan kecenderungan menurun sejalan dengan penurunan kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara IPM dan NTP dengan kemiskinan provinsi di Sulawesi tidak searah atau negatif sedangkan pengangguran terbuka berbanding lurus dengan kemiskinan.

Selanjutnya kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan (*income*) dan rendahnya daya beli (*expenditure*). Dalam kurun tahun 2015-2018, Daya Beli dan tingkat Upah Minimum Provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun dan fenomena ini berbanding terbalik dengan perkembangan Kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode yang sama.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka patut diduga bahwa Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia, merupakan faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Namun pernyataan tersebut masih memerlukan kajian yang mendalam untuk membuktikan melalui serangkaian uji statistik dan tinjauan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian sebelum yang menganalisis kelima faktor yang diuraikan di atas, diduga mempengaruhi kemiskinan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang menggunakan kelima faktor sekaligus tersebut dalam penelitian belum atau masih jarang ditemukan. Yang ditemukan maksimal hanya menggunakan tiga dari lima variabel tersebut untuk memprediksi kemiskinan. Penelitian ini mengembangkan model penelitian Ningrum (2017) dengan menambahkan variabel bebas Daya Beli dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai variabel yang memprediksi Kemiskinan dengan menggunakan analisis yang sama, yaitu Regresi Data Panel.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sejalan dengan penelitian Ningrum (2017) yaitu penelitian yang dilakukan Lutfi, Wibisono, dan Yulianti (2017) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Septanto (2017), Prasetyonigrum dan Sukmawati (2016) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan yang kontradiktif adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dan Ihsan (2018) dan Octasari (2016) menyimpulkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan (Syarifullah dan Malik, 2017) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Sebagaimana dimaknai oleh Chambers (1996), kemiskinan, khususnya di daerah-daerah provinsi (kebutuhan negara) adalah masalah kelemahan, keterputusan, kelemahan dan kekurangan yang sebenarnya. Dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Singkatnya, saling keterkaitan diantara berbagai aspek kemiskinan tersebut atau oleh Chambers disebut sebagai kluster ketakberuntungan '*the clusters of disadvantage*' telah membentuk suatu lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (*the vicious circle of poverty*) atau '*the deprivation trap*'.

Berdasarkan hasil kajian teori dan empiris yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan model penelitian Ningrum (2017) serta mengembangkan model tersebut dengan menambahkan variabel Daya Beli dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai variabel yang memprediksi Kemiskinan provinsi di Sulawesi.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Hasil kajian teoritik dan empiris tentang Kemiskinan yang dipengaruhi oleh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dijadikan landasan atau rujukan dalam kerangka pemikiran penelitian dan dasar untuk merumuskan hipotesis dijelaskan sebagai berikut.

Arti kebutuhan sangat berbeda dari ketidakberdayaan untuk mengatasi masalah mendasar ke arti kemiskinan dengan memikirkan bagian ramah dan moral. Kemiskinan dapat dicirikan sebagai keadaan yang sangat sulit. Kemiskinan juga dapat digambarkan oleh kegagalan untuk mengatasi masalah yang berbeda untuk makanan, penginapan, dan pakaian, tingkat upah yang rendah, sekolah dan kemampuan yang rendah, pemutusan hubungan sosial karena kapasitas terbatas untuk mengambil bagian dalam kegiatan persahabatan. Jadi, kebutuhan dapat dicirikan sebagai harapan yang rendah untuk kenyamanan sehari-hari, khususnya tingkat kesulitan materi dalam jumlah atau kelompok yang kontras dengan gaya hidup yang sebagian besar diakui di mata public yang bersangkutan (Suparlan, 1984)

Pengangguran terbuka yaitu mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Kemudahan penunjuk pengangguran terbuka ini baik dalam satuan maupun persen sangat membantu sebagai semacam perspektif bagi otoritas publik untuk membuat posisi baru. Demikian pula, kemajuannya dapat menunjukkan laju pencapaian program kerja dari tahun ke tahun dan digunakan sebagai penanda untuk menilai kemajuan perputaran uang.

Mengingat UU. 13/2003, “Upah adalah kebebasan buruh/pekerja yang diperoleh dan disampaikan sebagai uang tunai sebagai hadiah dari pengusaha/bos kepada buruh/pekerja yang tidak ditetapkan dan dibayar dengan kesepakatan kerja, pengaturan atau pedoman hukum termasuk tunjangan. bagi buruh/pekerja, buruh dan keluarganya untuk suatu tugas atau kemungkinan penyelenggaraan yang telah atau akan dilakukan”. (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2000, Bab I, Pasal 1, Ayat 30)

Skala swapping peternak (NTP) adalah proporsi antara file biaya yang diperoleh peternak dan daftar biaya yang dibayarkan peternak yang dikomunikasikan dalam tarif (Kementerian Pertanian (2013), BPS (2013) dan Ismathono (2003)). tingkat bantuan pemerintah peternak (Utomo, 2004). Catatan biaya yang diperoleh peternak (IT) adalah daftar biaya yang menunjukkan peningkatan biaya pembuat untuk item peternak. Dari nilainya, sangat mungkin terlihat perbedaan dalam biaya produk yang dibuat oleh peternak. File ini juga digunakan sebagai informasi pendukung dalam menghitung pembayaran kawasan hortikultura. TI ditentukan berdasarkan nilai jual barang-barang pedesaan yang dibuat oleh peternak, meliputi area padi, panen opsional, hewan, rumah petani, sayuran, dan produk perikanan (tangkapan dan pengembangan).

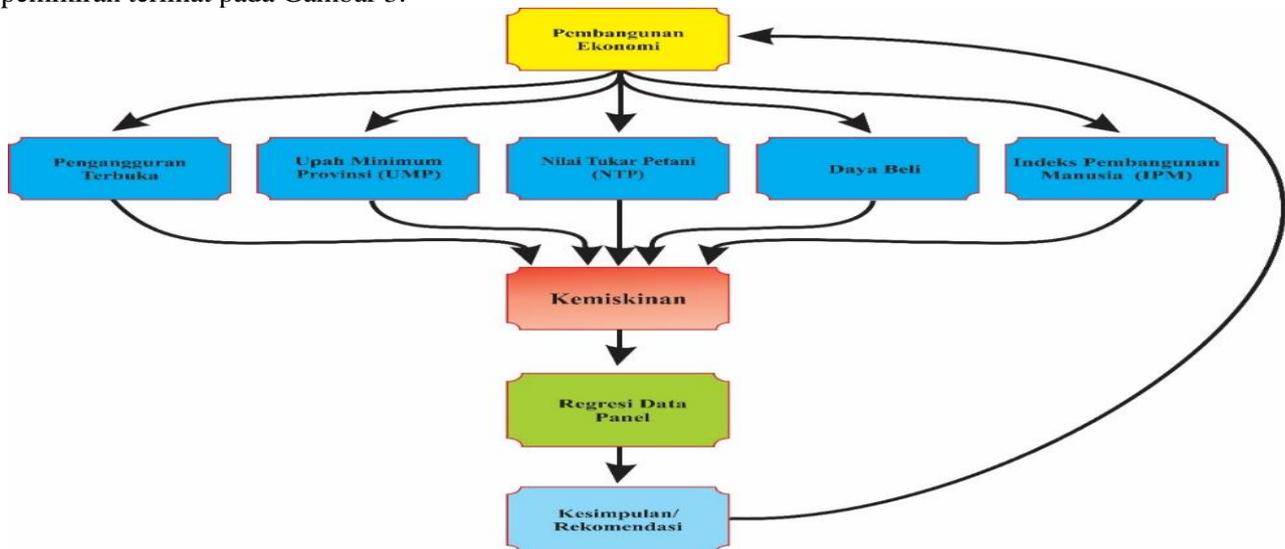
Gagasan Purchasing Power Parity (PPP) pertama kali dikemukakan oleh ahli keuangan Swedia, Gustav Cassell pada tahun 1918. Gagasan ini menggarisbawahi hubungan keseimbangan jangka panjang antara skala swapping dan biaya pinjaman, di mana standar konversi mencerminkan proporsi antara tingkat biaya di suatu negara dan tingkat biaya. bangsa yang berbeda. Premis dari ide PPP adalah bahwa korelasi nilai suatu barang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh pembelian uang tunai itu untuk tenaga kerja dan produk di setiap negara.

Sesuai UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) mengukur pencapaian peningkatan manusia dalam pandangan berbagai bagian penting dari kepuasan pribadi. Sebagai bagian dari kepuasan pribadi, HDI bekerja melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan yang umum digunakan; Umur Harapan Hidup Saat Lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator; Harapan Lama

Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan Daya Beli yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan Daya Beli masyarakat yang disesuaikan terhadap sejumlah barang dan jasa-jasa kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata besar pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk layak hidup baik pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan. (BPS, 2018).

Hipotesis

Hasil kajian empiris membuktikan bahwa pengangguran, upah minimum, Nilai Tukar Petani, daya beli dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan arah pengaruh yang berbeda di setiap variabel ((Hidayat, 2008); (Hudaya, 2009); (Ningrum, 2017); (Aprillia, 2015); (Ahmaddien, 2019); (Yustie, 2017); (Sari & Mangkuwinata, 2017); (Lutfi, Wibisono, & Yuliati, 2016); (Ihsan & Ikshan, 2018); (Panjaitan & Nasution, 2015); (Octasari, 2016); (Retnasari, 2013); (Probosiwi, 2016); (Tisniwati, 2012); (Sunarya, 2018); (Widodo, Suriani, Putri, & Evi, 2019); (Ningsih & Syechalad, 2016); (Sari & Mangkuwinata, 2017)). Adapun Kerangka pemikiran terlihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran, kajian empiris dan teori, maka rumusan hipotesis penelitian adalah: 1) Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi, 2) Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi, 3) Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi, 4) Daya Beli berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi, 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi.

3. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan pengangguran, upah, Nilai Tukar Petani, daya beli, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap persentase Kemiskinan pada 6 provinsi di Sulawesi periode 2010-2018.

Penelitian ini menjelaskan atau menganalisis bagaimana pengaruh pengangguran, upah, daya beli, Nilai Tukar Petani, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan pada 6 provinsi di Sulawesi periode 2010-2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data panel yang terdiri atas data *crosssection*, yaitu sebanyak 6 provinsi di Sulawesi yang terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Data runtut waktu, yaitu periode

2010-2018. Data sekunder yang dimaksud adalah data historis variabel Pengangguran, Upah, Daya Beli, Nilai Tukar Petani, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan provinsi di Sulawesi periode 2010-2018.

Sumber data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga eksternal, yaitu Badan Statistik Pusat (BPS) Provinsi Di Sulawesi dan lembaga eksternal lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah dilakukan lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Common Effect Models (CEM)

Common Effect Models (CEM) merupakan model regresi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil pengolahan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi *Common Effect Models (CEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.414234	0.152469	2.716839	0.0091
TPT	-0.423826	0.117306	-3.612994	0.0007
LOG_UMP	-0.088695	0.028184	-3.147025	0.0028
NTP	-0.000665	0.000674	-0.986828	0.3287
LOG_PPP	0.074281	0.013607	5.458959	0.0000
IPM	-0.010006	0.001396	-7.165181	0.0000
R-squared	0.826901		F-statistic	45.85948
Adjusted R-squared	0.808869		Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data BPS 2019 (diolah)

Fixed Effect Models (FEM)

Hasil pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 10.0 terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Estimasi Fixed Effect Models (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.484786	0.157922	3.069777	0.0037
PT	0.103952	0.121781	0.853597	0.3981
LOG_UMP	0.077237	0.030515	2.531089	0.0151
NTP	0.000178	0.000373	0.478643	0.6346
LOG_PPP	-0.00416	0.024111	-0.17249	0.8639
IPM	-0.01196	0.004422	-2.70364	0.0098
Fixed Effects (Cross)				
R-squared	0.950775	F-statistic		83.05472
Adjusted R-squared	0.939328	Prob (F-statistic)		0.00000

Sumber: Data BPS 2019 (diolah)

Random Effect Model (REM)

Hasil pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 10.0 Lebih jelas penulis sajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Estimasi Random Effect Models (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.414234	0.152469	2.716839	0.0091
PT	-0.42383	0.117306	-3.61299	0.0007
LOG_UMP	-0.08869	0.028184	-3.14703	0.0028
NTP	-0.00067	0.000674	-0.98683	0.3287
LOG_PPP	0.074281	0.013607	5.458958	0.0000
IPM	-0.01001	0.001396	-7.16518	0.0000
Random Effects (Cross)				
R-squared	0.826901	F-statistic		45.85948
Adjusted R-squared	0.808869	Prob(F-statistic)		0.00000

Sumber: Data BPS 2019 (diolah)

Berdasarkan model persamaan Regresi Data Panel, selanjutnya akan dilakukan serangkaian uji untuk menentukan model regresi data panel yang manakah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Chow (Uji F), uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM-test).

Kriteria Pemilihan Model

Uji Chow

Hasil uji Chow terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.64209	(5,43)	0.00000
Cross-section Chi-square	67.90351	5	0.00000

Sumber: Data BPS 2019 (diolah)

Tabel 5.13 terlihat bahwa nilai probability Cross-section F sebesar 0.0000 dan nilai ini lebih kecil dari 0.05 sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Models (FEM)*. Oleh model yang terpilih adalah FEM, maka selanjutnya dilakukan uji Hausman dan uji LM tidak diperlukan lagi.

Uji Hausman

Hasil uji Hausman terlihat pada Tabel 5

Tabel 5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.0000	5.0000	1.0000

Sumber: Data BPS 2019 (diolah)

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probability **Cross-Section** random (1.0000) lebih besar 0.05 sehingga model terpilih yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **Random Effect Models (REM)**.

Hasil Model Terpilih

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, maka model regresi data panel yang digunakan untuk memprediksi Kemiskinan Provinsi di Sulawesi adalah **Random Effect Models (REM)**. Adapun persamaan regresi data panel adalah:

$$\text{KMK} = 0.414 - 0.424\text{PT} - 0.089\text{UMP} - 0.0007\text{NTP} + 0.074\text{PPP} - 0.010\text{IPM}$$

Dimana:

- KMK = Kemiskinan Provinsi di Sulawesi
- PT = Pengangguran Terbuka Provinsi di Sulawesi
- LOG UMP = Upah Minimum Provinsi di Sulawesi
- NTP = Nilai Tukar Petani Provinsi di Sulawesi
- LOG PPP = Daya Beli Penduduk Provinsi di Sulawesi
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Sulawesi

Berdasarkan Tabel 5.12, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.8269 atau sebesar 82.69%. Nilai koefisien determinasi sebesar 82.69% berarti bahwa kemampuan variabel Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya beli dan Indeks Pembangunan Manusia dalam menjelaskan variasi perubahan variabel Kemiskinan Provinsi di Sulawesi sebesar 82.69% sedangkan sisanya sebesar 17.31% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi **Models Random Effect** tersebut termasuk dalam kategori atau layak untuk memprediksi kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Table 3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.424. dan *Probability t-statistics* = 0,0007 dengan $\alpha = 0,05$ sehingga Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan negative terhadap Kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan

Tabel 3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.0887 dan nilai *Probability t-statistics* = 0.0028 dengan $\alpha = 0.05$ sehingga Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Pengaruh Nilai Tukar Petani (NPT) Terhadap Kemiskinan

Tabel 3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.0006 dan nilai *probability t-statistics* = 0.328 dengan $\alpha = 0.05$. sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Pengaruh Daya Beli Terhadap Kemiskinan

Tabel 3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.0743. dan nilai *Probability t-statistics* = 0.0000 dengan $\alpha = 0.05$ sehingga Daya Beli berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Tabel 3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.010 dan nilai *probability t-statistics* = 0.0000 dengan $\alpha = 0.05$ sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Pembahasan

Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan perangkat lunak Eviews 10.0, diperoleh nilai F-hitung sebesar 37.921 sedangkan nilai *probability F-statistik* dengan peluang kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan sebesar α (5%) dan derajat bebas $v_1=k=5$ serta derajat bebas $v_2 = n-k-1 = 54-5-1 = 48$. Karena nilai *probability F-statistik* lebih kecil dari nilai α 5%, maka dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien regresi sebesar -0.424 dengan nilai signifikan *probability t-statistik* sebesar 0.0007 pada derajat bebas $n-1=54-1=53$. Karena nilai *probability t-statistik*

lebih kecil dari nilai alpha 5%, maka hipotesis nol ditolak atau menerima hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada tingkat keyakinan 95% dapat dinyatakan bahwa variabel Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi tahun 2010-2018. Nilai koefisien sebesar -0.424 berarti bahwa apabila Pengangguran Terbuka meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.424 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah hubungan Pengangguran Terbuka dengan kemiskinan adalah negatif sehingga hasil penelitian ini secara spesifik menyimpulkan bahwa Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini membuktikan bahwa Upah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Nilai koefisien sebesar -0.089 berarti bahwa apabila Upah meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.089 persen.

Dalam penelitian ini, pengukuran upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi di Sulawesi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi berdasarkan pada Kebutuhan hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas. Kebutuhan hidup yang adil (KHL) adalah kebutuhan standar seorang spesialis/pekerjaan soliter untuk memiliki pilihan hidup yang benar-benar berkecukupan untuk kebutuhan 1 (satu) bulan dan nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survey harga yang dilakukan secara berkala.

Pengaruh negatif dan signifikan Upah Minimum Provinsi terhadap kemiskinan sejalan dengan fenomena hubungan antara upah dan kemiskinan. Periode 2001-2018, perkembangan nilai Upah Minimum Provinsi menunjukkan trend meningkat, menunjukkan semakin meningkatnya produktivitas kerja. Teori upah Ricardo (1998) mengungkapkan bahwa besarnya tingkat upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan hidup pekerja beserta keluarga dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan/pemerintah. Teori upah ini mempresentasikan bahwa besarnya tingkat upah akan selalu mengalami perubahan, baik naik maupun turun. Dalam penelitian ini, perkembangan Upah Minimum Provinsi menunjukkan trend meningkat setiap tahun. Meningkatnya Upah Minimum Provinsi dapat meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja minimal kebutuhan dasar, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Meningkatnya kesejahteraan, akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin atau kemiskinan Provinsi di Sulawesi.

Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Nilai koefisien sebesar -0.00067, berarti bahwa apabila Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.00067 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan kemiskinan adalah negatif. Hasil penelitian ini secara spesifik menyimpulkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi di Sulawesi.

Terbuktinya hipotesis ketiga ini dapat dijelaskan secara empiris, berdasarkan rata-rata NTP seperti terlihat pada tabel 5.6. Hal.151 dan Gambar 5.10 Hal.157, menunjukkan bahwa nilai NTP di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo selama periode pengamatan menunjukkan angka indeks lebih besar 100, berarti bahwa tingkat kesejahteraan petani meningkat dan menurut BPS (2019) nilai NTP lebih besar dari 100 dapat mendorong menurunkan kemiskinan. Fenomena tersebut berbeda dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dimana NTP lebih kecil dari 100, berarti bahwa dalam periode pengamatan tingkat kesejahteraan petani menurun, selanjutnya dapat meningkatkan kemiskinan. Dari data, diketahui bahwa nilai NTP beragam dan keragaman tersebut menunjukkan beragamnya tingkat kesejahteraan petani Provinsi di Sulawesi. Akibat dari beragamnya tingkat kesejahteraan petani tersebut, berdampak pada kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar, selanjutnya mempengaruhi kemiskinan Provinsi di Sulawesi periode 2010-2018.

Ditemukannya rata-rata NTP Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara lebih kecil dari 100 menggambarkan masih rendahnya produktivitas petani di kedua Provinsi tersebut. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan yang diterima petani menjadi rendah. Oleh karena itu, nilai NTP lebih kecil dari 100 dan hasil inilah secara empiris menyebabkan tidak signifikan pengaruh NPT terhadap kemiskinan dalam penelitian ini.

Selain dari rendahnya NTP kedua provinsi tersebut, juga karena harga produksi pertanian cenderung in-elastis, baik kuantitas maupun kualitas, kelangkaan faktor produksi pendukung (pupuk, Obat-obatan) dan harga tidak terjangkau petani, rantai tataniaga hasil pertanian relatif panjang, perubahan teknologi pertanian yang cepat, respon petani lambat, karena pendidikan dan ketrampilan rendah, sistem impor pangan, harga produksi menurun saat musim panen, penawaran meningkat permintaan tidak berubah, produktivitas menurun, penurunan harga tidak dikompensasi dengan kenaikan produktivitas, Alih fungsi lahan terus terjadi dan produktivitas lahan semakin menurun serta perilaku petani dipengaruhi oleh peran dan perilaku diluar petani. (Rizal Ramli, Faisal Basri dan Eny Sri Hartati; 2019).

Pengaruh Daya Beli Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis keempat yang diajukan, yaitu: Daya Beli berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Arah hubungan dengan kemiskinan adalah positif. Artinya bahwa meningkatnya Daya Beli menyebabkan meningkatnya kemiskinan atau menurunnya Daya Beli menyebabkan kemiskinan menurun. Menurut Basri (2015), daya hanya merupakan istilah bukan teori. Menurut *Oxford Dictionary of Economics*, daya beli merupakan jumlah barang dan jasa nyata yang akan dibeli setiap unit uang.

Tinjauan teoritik menyatakan bahwa daya beli berkaitan dengan pendapatan masyarakat artinya pendapatan meningkat menyebabkan daya beli meningkat masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kemiskinan. Pernyataan ini terkonfirmasi oleh fenomena daya beli Provinsi di Sulawesi tahun 2010-2018 yang menunjukkan trend meningkat. Sementara dalam periode yang sama kemiskinan menunjukkan trend menurun.

Tidak terbuktinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, lebih disebabkan bahwa daya beli tidak secara langsung menurunkan kemiskinan karena faktor stabilitas harga yang terjadi selama periode pengamatan tahun 2010-2018.

Selain dari hal di atas, Faisal Basri (2018), Adanya kebijakan penyesuaian tingkat upah, tingkat inflasi rendah, pengangguran terbuka tidak mengalami kenaikan, pertumbuhan konsumsi lambat, cenderung stabil, harga-harga relatif tidak mengalami gejolak, kenaikan konsumsi masyarakat, pertumbuhan kredit, kenaikan tabungan masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, pendapatan riil masyarakat tidak turun, kenaikan pendapatan per-kapita riil, pembentukan modal bruto meningkat; laju pembentukan modal tetap bruto dalam jangka panjang meningkat dan pertumbuhan PDRB meningkat.

Umumnya ketika realisasi investasi tumbuh, maka bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan akan meningkatkan penghasilan dan kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan industri ritel yang sesungguhnya menggambarkan daya beli masyarakat dalam tahun 2010-2018 hanya mengalami pertumbuhan 3%, lebih rendah dari kondisi normal yang sebesar 12-14%. Sementara inflasi per Juli dalam periode yang sama (tahun ke tahun) tumbuh sebesar 3.88%. Perkembangan ritel yang lebih rendah dari ekspansi menunjukkan tidak adanya pengeluaran yang besar. Sementara itu, mendekati usaha adalah spekulasi serius modal yang tidak mengasimilasi terlalu banyak pekerja. Jika tenaga kerja yang dikonsumsi tidak ideal, sangat mungkin ditemukan bahwa akan terjadi pelemahan daya beli (Thomas, 2019).

Dari deskripsi di atas, pertumbuhan inflasi lebih tinggi daya beli masyarakat sehingga tidak ada pembelanjaan yang impresif. Kondisi ini memungkinkan akan terjadi pada Provinsi di Sulawesi mengingat bahwa perkembangan inflasi menunjukkan trend meningkat selama tahun 2010-2017. Meningkatnya inflasi sejalan dengan meningkatnya daya beli Provinsi di Sulawesi dalam periode 2010-2018 sehingga faktor inflasi yang menyebabkan hasil penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan daya beli terhadap kemiskinan dengan arah yang berlawanan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini membuktikan hipotesis kelima, yaitu Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Nilai koefisien sebesar -0.010 berarti bahwa apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.010 persen.

Menurut Bank Dunia, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, namun juga disebabkan oleh faktor non-ekonomi. Sementara itu, menurut Sayuti (2006), Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk dalam mengakses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, Lanjouw (2001) menyatakan bahwa pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan, karena peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan pada penduduk dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Jhingan (1994) menyatakan bahwa salah satu strategi menurunkan angka kemiskinan dengan menaikkan IPM.

Pernyataan ini dibuktikan secara empiris dibuktikan oleh Amaluddin, A. Payapo, RW. Laitupa. A.A dan Serang.MR., Ningsih dan Syechalad, Shinta Setya Ningrum, Noviatamara, Ardina & Amalia, Yusti, Kristianto dan Prasetya, menguji dan menganalisis, hubungan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi (UMP), Nilai Tukar Petani (NTP), Daya Beli, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi periode tahun 2010-2018., 2) Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena sesungguhnya pertumbuhan investasi rendah menyebabkan produksi rendah, akan menurunkan PDRB, selanjutnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja tidak optimal dan meningkatkan pengangguran yang pada akhirnya seharusnya meningkatkan kemiskinan, namun dalam penelitian ini menurunkan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor; Pertumbuhan manufaktur, pariwisata dan makanan menyerap tenaga kerja 60 %; ritel besar dan kecil 11 %; Jaminan Sosial 10 %, Konstruksi 10,88 % dan jasa kuliner, rekreasi 4 %, pemutusan hubungan kerja (PHK), tingkat upah yang berlaku; realisasi investasi rendah sifatnya padat modal, kondisi pasar tenaga kerja, Penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja, peraturan pemerintah, struktur pendidikan didominasi lulusan SMK, pertumbuhan industri pengolahan dan industri dasar, angkatan kerja baru bekerja secara informal pada sektor pertanian dan jumlah usia produktif lebih banyak dari non produktif, 3) Upah Minimum Provinsi (UMP) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi; karena dengan tingkat Upah Minimum Provinsi dapat meningkatkan konsumsi, mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, selanjutnya meningkatkan PDRB yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Hal ini disebabkan; kebijakan penyesuaian tingkat upah; tingkat inflasi terkendali; pengangguran terbuka tidak mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi meningkat; pertumbuhan industri pengolahan; industri dasar; pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman dan jasa kuliner dan konstruksi, 4) Nilai Tukar Petani berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan,; karena; rata-rata NTP Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara lebih kecil dari 100 menggambarkan masih rendahnya produktivitas petani, harga produksi pertanian cenderung in-elastis, baik kuantitas maupun kualitas cenderung menurun, kelangkaan faktor produksi pendukung (pupuk, Obat-obatan) dan harga tidak terjangkau petani, rantai tataniaga hasil pertanian relatif panjang, perubahan teknologi pertanian yang cepat, respon petani lambat karena pendidikan dan ketrampilan rendah, sistem impor pangan, harga produksi menurun saat musim panen, penawaran meningkat permintaan tidak berubah, produktivitas menurun, penurunan harga tidak dikompensasi dengan kenaikan produktivitas, Alih fungsi lahan terus terjadi dan produktivitas lahan semakin menurun serta perilaku petani dipengaruhi oleh peran dan perilaku diluar petani, 5) Hipotesis yang diajukan tidak terbukti; bahwa Daya Beli mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Daya

beli meningkat tidak dibarengi dengan stabilitas harga tidak akan secara langsung meningkatkan konsumsi, dan hal ini menyebabkan secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Hal ini disebabkan, kebijakan penyesuaian tingkat upah, tingkat inflasi rendah, pengangguran terbuka tidak mengalami kenaikan, pertumbuhan konsumsi lambat, cenderung stabil, harga-harga relatif tidak mengalami gejolak, kenaikan konsumsi masyarakat, pertumbuhan kredit, kenaikan tabungan masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, pendapatan riil masyarakat tidak turun, kenaikan pendapatan per-kapita riil, pembentukan modal bruto meningkat; laju pembentukan modal tetap bruto dalam jangka panjang meningkat dan pertumbuhan PDRB meningkat, 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Dengan meningkatnya IPM akan menyebabkan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, yang direfleksikan oleh kemampuan penduduk mengakses dan memperluas pilihan-pilihan terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa saran yang direkomendasikan dalam kaitannya dengan upaya penurunan jumlah penduduk miskin Provinsi di Sulawesi adalah:

1. Nilai Tukar Petani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani disarankan: meningkatkan Kuantitas dan kualitas produksi, nilai tambah produk pertanian, memperbaiki rantai tataniaga, penetapan harga dasar yang seimbang, stabilisasi harga, harga faktor produksi terjangkau, pengembangan Agroindustri, membatasi impor pangan, mengontrol perilaku eksternal petani, peningkatan daya saing, produksi orientasi ekspor, peningkatan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi.
2. Daya Beli masyarakat meningkatkan kemiskinan Provinsi di Sulawesi dalam periode 2010-2018. Seharusnya meningkatnya daya beli masyarakat dapat menurunkan kemiskinan dan oleh karenanya untuk menurunkan angka kemiskinan yang disebabkan oleh daya beli masyarakat, hendaknya Pemerintah Provinsi menjaga stabilitas harga (inflasi).
3. Pengangguran Terbuka menurunkan kemiskinan Provinsi di Sulawesi. Maka Penciptaan lapangan kerja yang spesifik, sesuai keinginan pasar kerja, Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berbasis penguasaan teknologi melalui pendidikan formal dan non formal, peningkatan kompetensi, meningkatkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja usia produktif (*jiwa Entrepreneurship*), menciptakan iklim usaha yang kondusif, menghilangkan *high cost economi* dalam birokrasi dan penyederhanaan perizinan bagi UMKM swasta serta mendorong usaha-usaha yang berorientasi ekspor.
4. Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan yang berkaitan dengan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka hendaknya Pemerintah Provinsi di Sulawesi mempertahankan dan meningkatkan program perlindungan sosial, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial khususnya bagi penduduk miskin.

Bagi peneliti selanjutnya, bahwa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat general, maka disarankan untuk lebih memperluas objek penelitian dan periode pengamatan.

Daftar Pustaka

- Ahmaddien, I. 2019. Faktor Determinan Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat dengan Regresi Data Panel Factors Determinants of Severity and Depth of Poverty Index in West Java Using Data Panel Regression, 21(1), 87–96.
- Aprillia, A. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Malang Raya Tahun 2004-2013). Jurnal Mahasiswa, 1–9.
- Chambers. 1995. Poverty and Livelihood:Whose Reality Counts,Discussion Paper 347, Brighton: Institute of Development Studies.
- Hermawan. 2006. Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif. Grasindo, Jakarta.

- Hidayat, N.K. 2008. Analisis Hubungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, 94–96. <https://jembataniga.com/2015/06/> Paradigma Pembangunan-Berkelanjutan-Membangun-Perspektif/Diakses Tanggal 21 Agustus 2019.
- Hudaya, D.2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <file:///E:/New folder/> Penelitian Ekonometrika/Referensi/Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia.pdf
- Ihsan, K., & Ikshan. 2018. Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3(3), 408–419.
- Lutfi, A.F., Wibisono, S., & Yulianti, L. 2016. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Periode 2006-2013
- Ningrum, S. S. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Octasari, T. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia, Tahun 2009-2013. Pendidikan Dan Ekonomi, 5. No. 6, 495–502.
- Panjaitan, L., & Nasution, H. 2015. Aplikasi Analisis Jalur Dalam Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara. KHARISMATIKA, 1(3), 97–108.
- Prasetyoningrum, A.K., & Sukmawati, U.S. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.57>
- Retnasari, E. D. 2013. Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2007-2011. Di Provinsi Jawa Timur (Vol. 3).
- Sari, J., & Mangkuwinata, D. S. 2017. Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 18(2), 94–107.
- Septanto, A.Y. 2017. Analisis Pengaruh Urbanisasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). JURNAL ILMIAH, 2015, 1–21
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sari, J., & Mangkuwinata, D. S. 2017. Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 18(2), 94–107.
- Sunarya, I. Banyu. 2018. Analisis Pengaruh PDRB Per-Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2010 –2015.
- Suparlan. 1984. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tisniwati, B. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 33. <https://doi.org/10.22219/Jep.V10i1.3714>